

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, sebab tanpa adanya hukum kehidupan manusia dalam bermasyarakat akan sulit diatur dan tidak terarah. Kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik dan teratur apabila terdapat hukum diantaranya. Akan lebih efektif lagi apabila masyarakat menaati setiap hukum yang berlaku ditengah-tengah mereka.

Semakin maraknya kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat, membuat masyarakat merasa sangat dirugikan dalam memerjuangkan haknya sendiri. Salah satu cara yang dapat ditempuh masyarakat dalam memperjuangkan haknya adalah melalui jalur hukum. Dalam setiap interaksi masyarakat mauppun dalam hidup berbangsa dan bernegara, hukum merupakan bagian paling penting. Meskipun terkadang bagi sebagian masyarakat ada yang tidak peduli dengan adanya hukum, atau masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum yang berlaku. Dengan demikian tentu perlu adanya wibawa hukum agar masyarakat dapat mematuhi hukum. Akan tetapi, dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang tidak patuh hukum, bahkan mirisnya masyarakat seringkali menggunakan hukum rimba dalam mengadili

setiap kejahatan yang ada, hal ini terjadi karena tidak adanya wibawa hukum.¹

Salah satu jenis kejahatan yang paling menonjol ialah pencurian. di dalam KUHP pencurian ini diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun penjara, atau denda paling banyak sebesar Sembilan ratus rupiah. Pencurian sendiri merupakan suatu perbuatan mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.²

Maraknya kasus pencurian yang terjadi tentu menjadikan masyarakat semakin geram. Sehingga, tanpa berpikir panjang masyarakat langsung menghakimi pelaku pencurian dengan melakukan tindakan main hakim sendiri tanpa melibatkan pihak kepolisian. Padahal, dengan menghakimi sendiri pelaku kejahatan masyarakat berarti telah memberikan kontribusi yang negative terhadap proses penegakan hukum serta hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hak asasi yang termasuk dalam tindakan pidana. Mungkin memang sebagian masyarakat tidak mengetahui bahwa para pelaku kejahatan juga memiliki hak asasi, mereka juga memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum di muka pengadilan.

¹Fuadi Isnawa.2018. *Pandangan Yuridis Sosiologis Fenomena Street Justice Di Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Jurnal Hukum Novelty*. Vol. 9 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. hal. 17-35

²R. Soenarto Soerodibroto. 1991. *KUHP dan KUHPA dilengkapi yurisprudensi mahkamah agung*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. hlm.221.

Agar kehidupan masyarakat berjalan secara normal dan stabil, norma hukum perlu dijadikan sebagai pedoman dalam hidup bermasyarakat. Dengan begitu kepentingan maupun kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam dapat diselarakan antara satu dengan lainnya. Sehingga pada akhirnya norma hukum ini mampu menciptakan kehidupan bermasyarakat yang lebih tenteram. Dari banyaknya norma yang ada, norma hukum memiliki perbedaan dan ciri yang khusus dibandingkan dengan norma lainnya. Norma hukum memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, melalui keserasian, ketertiban, dan keadilan.³ Sehingga untuk menciptakan tujuan hukum tersebut perlulah masyarakat mematuhi suatu norma atau peraturan yang ada. Didalam KUHP pun melarang masyarakat untuk melakukan *eigenrechting* atau tindakan main hakim sendiri, sebab perbuatan tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia berupa Negara hukum, yang artinya segala sesuatunya diatur dengan hukum, termasuk tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia.⁴

Eigenrechting sendiri terjadi hampir diseluruh penjuru Indonesia, dari daerah perkotaan hingga pedesaan. Dengan banyaknya kasus tindakan main hakim sendiri yang terjadi terlebih terhadap pelaku pencurian, membuktikan

³Sudarsono S.H.,M.Si. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Penerbit Rneka Cipta. Hlm.68

⁴Barda Narwawi Arief. 2008. *Kebijakan hukum pidana*. Jakarta. Penerbit Kencana Prenada Media Group. hlm.57.

bahwa saat ini kesadaran masyarakat akan adanya hukum sangatlah rendah serta kurangpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum juga menjadi salah satu factor pemicunya. Karenan begitu banyak kasus serupa yang terjadi serta dengan mudahnya para pelaku kejahatan lolos dari jeratan hukum, tindakan main hakim sendiri ini dianggap lemah dalam penegaannya.⁵

Sesuai dengan ketentuan yang ada, apabila suatu penggaran dilakukan oleh satu atau dua orang maka mudah bagi penegak hukum menerapkan hukum terhadapnya. Karena kekuatan para penegak hukum jauh lebih besar daripada kekuatan pelanggar. tetapi, apabila pelanggar hukum itu berjumlah banyak atau “massa” maka kekuatan penegak hukum kemungkinan tidak cukup untuk menerapkan hukum secara seharusnya. disaat seseorang atau masyarakat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka perbuatan tersebut dapat disebut sebagai aksi sepihak atau menghakimi sendiri, perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang atau semaunya sendiri, tanpa menagntongi persetujuan pihak lain yang berkepentingan.

Berdasarkan banyaknya kasus yang terjadi penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan terkait tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku

⁵Aima. *Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Islam Dan KUHP*. <http://eprints.radenfatah.ac.id>, diakses tanggal 17 November 2019.

pencurian. setelah melihat begitu banyak kasus terkait tindakan main hakim sendiri yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Makassar, Yogyakarta, Banyumas, Bekasi, dan masih banyak lagi. Dalam hal ini penulis mengambil contoh kasus yang terjadi di Probolinggo. kejadian tersebut bermula saat pelaku mencuri motor Honda Revo milik seorang warga Dusun Darungan, Desa Tlogosari, Kecamatan Tiris, Probolinggo pada Senin (9/7/2018) pukul 01.30 WIB. Saat beraksi, pemilik motor memergoki pencurian motor miliknya. Korban kemudian berteriak maling dan warga akhirnya berhamburan memburu pelaku. Sempat terkepung, pelaku kemudian bersembunyi di salah satu rumah warga dan akhirnya tertangkap. Warga yang sudah emosi kemudian menyeret pelaku dan menghakiminya sampai babak belur. Namun aksi warga belum berhenti karena pelaku disiram bensin dan dibakar hidup-hidup. Polisi yang datang ke lokasi kejadian tidak bisa berbuat apa-apa karena warga sudah tersulut emosinya.⁶

Berkaitan dengan hal tersebut hukum diciptakan ditengah-tengah masyarakat untuk mengatur kehidupan manusia, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan, agar supaya tidak terjadi benturan perbedaan dan kepentingan setiap elemen masyarakat. Berdasarkan hal tersebut tindakan *eigenrechting* boleh dikatakan keliru, sebab pelaku tindak pidana juga memiliki hak untuk dilindungi sekalipun ia dinyatakan bersalah. Karena

⁶M Rofiq – detikNews. *Maling Motor Tewas Dibakar Massa di Probolinggo Dikenal Kebal Dibacok*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4161759/maling-motor-tewas-dibakar-massa-di-probolinggo-dikenal-kebal-dibacok>, diakses tanggal 12 November 2019.

sejatinya Manusia memiliki hak yang sudah ada sejak lahir atau sering disebut dengan HAM. Hak ini diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika seseorang tersebut melakukan kejahatan. Dia masih berhak diperlakukan secara layak. Selain itu pula sekalipun seseorang telah diketahui melakukan kejahatan, masyarakat bahkan penegak hukum pun tidak boleh memperlakukan pelaku tindak pidana tersebut sewenang-wenang.

⁷Sebagaimana asas praduga tak bersalah yang terdapat dalam peradilan pidana di Indonesia yang termaktub dalam pasal 8 UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman mengatakan bahwa setiap orang yang ditahan, disangka, ditangkap, dituntut, dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan ketersalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan yang tercantum dalam pasal tersebut, maka perbuatan *eigenrechtig* tersebut termasuk dalam perbuatan pidana.

Perbuatan main hakim sendiri memang belum ada undang-undang khusus yang mengatur. Namun bukan berarti perbuatan tersebut tidak dapat ditindak lebih lanjut oleh hukum. Berdasarkan unsur-unsur yang ada, perbuatan main hakim sendiri tersebut merujuk pada beberapa pasal yang ada dalam KUHP. Pasal-pasal yang mengatur mengenai tindakan main hakim

⁷Damang Averroes, *Hak-hak Tersangka/ terdakwa secara umum dalam KUHP*, <https://www.negarahukum.com/>, diakses pada 2 Desember 2019

sendiri dalam KUHP yaitu pasal 170 tentang pengeroyokan, pasal 351 tentang penganiayaan dan pasal 354 tentang penganiayaan berat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji perihal tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) dengan judul penulisan “TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGNRECHTING) OLEH MASSA TERHADAP PELAKU PENCURIAN (STUDY DI POLRES PROBOLINGGO)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa factor penyebab terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Oleh Massa Terhadap Pelaku Pencurian Di Probolinggo?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Oleh Massa Terhadap Pelaku Pencurian Di Probolinggo?
3. Apa hambatan kepolisian dalam menangani Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Oleh Massa Terhadap Pelaku Pencurian Di Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui factor penyebab terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Oleh Massa Terhadap Pelaku Pencurian Di Probolinggo.
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Oleh Massa Terhadap Pelaku Pencurian Di Probolinggo.
3. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan kepolisian dalam menangani Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Oleh Massa Terhadap Pelaku Pencurian Di Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

Dengan adanya hasil penelitian tentang Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Oleh Massa Terhadap Pelaku Pencurian (Study Di Polres Probolinggo)". Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran terhadap masyarakat untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*).

1. Manfaat Teoritis

Bagi masyarakat, penulis berharap dengan adanya hasil penelitian yang dikaji secara mendalam dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat tentang bagaimana seharusnya masyarakat

menyikapi peristiwa yang berkaitan dengan hukum, termasuk dengan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan termasuk pelaku pencurian. namun dalam hal ini diharapkan masyarakat menyerahkan semua kepentingan hukumnya kepada pihak yang berwajib, tanpa melakukan perbuatan yang anarkis serta melawan hukum. Serta dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menghindarkan terjadinya konflik antar masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, dengan terungkapnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman ilmu dan wawasan. Dan juga bagi masyarakat di Probolinggo, dengan terungkapnya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan koreksi demi mendapat solusi dalam menyikapi suatu keadaan ketika menemukan pelaku tindak pidana tanpa harus melakukan tindakan main hakim sendiri.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penyusunan proposal ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yang dimana pendekatan ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian dikaji lebih mendalam sesuai dengan perumusan masalah yang ada. Sehingga uraian tersebut dapat ditarik kesimpulannya yang bersifat logis.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di wilayah hukum kepolisian Resort Probolinggo.

3. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menjadi 2 bagian, antara lain :

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan para pihak terkait dengan tindakan main hakim sendiri di wilayah kepolisian Resort Probolinggo yakni polisi atau aparat yang berhubungan langsung dengan penindakan main hakim sendiri.
- b. Data sekunder, merupakan data yang didapat dari study kepustakaan yang terdiri dari berbagai bahan bacaan, buku-buku, laporan hasil penelitian, jurnal ilmiah, informasi dari beberapa media, serta literature yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Observasi, merupakan pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap hal-hal yang berkaitan dengan *eigenrechting*.

- b) Wawancara, ialah kegiatan Tanya jawab yang dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan para pihak yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian, guna mendapatkan keterangan yang kongkrit dan relevan.

5. Teknik analisa data

Data yang telah terkumpul, baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisa dengan teknik kualitatif yang disajikan dengan deskriptif terkait tindakan main hakim sendiri yang sering dilakukan di wilayah hukum kepolisian Resort Probolinggo. Sedangkan data dari hasil wawancara dianalisa dengan melihat kesesuaian antara fakta yang ada di lapangan dengan artikel ataupun berita terkait tindakan main hakim sendiri di Probolinggo.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini penulis membagi 4 Bab yang masing-masing berisi tentang bagian yang berbeda-beda, diantaranya :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Yang

kemudian akan dijadikan sebagai acuan analisis hasil penelitian di bab selanjutnya.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas terkait dengan hasil dari penelitian, yaitu upaya polres probolinggo dalam menangani tindakan main hakim sendiri oleh massa terhadap pelaku pencurian dan juga factor penghambat dalam menangani kasus tersebut.

BAB IV PENUTUP

Di bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat digunakan untuk perkembangan ilmu khususnya terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis.

